



Jurnal

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KUDUS**

Disusun guna untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Putri Lestari

NIM : 14010110120022

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran UMKM dalam Pembangunan Nasional merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Itu artinya, usaha mikro yang memiliki omset penjualan kurang dari satu milyar, dan usaha kecil memiliki omset penjualan pada kisaran satu milyar, serta usaha menengah dengan omset penjualan di atas satu milyar pertahun, memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa ini.

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Pembangunan ekonomi kerakyatan usaha menengah mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh. Untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang

kokoh maka usaha menengah perlu ditingkatkan jumlahnya dan diberdayakan menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah bersama seluruh lapisan untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber-sumber daya yang ada, baik potensi sosial-ekonomi masyarakat, sumberdaya alam maupun bantuan Pemerintah. Dalam era globalisasi batas negara tidak akan lagi menjadi penghalang bagi pergerakan barang, jasa dan uang. Dalam perdagangan bebas, peran negara semakin berkurang, maka perananan dari bagian dunia yang lebih kecil akan menonjol, termasuk peran Pemkab. Terciptanya pasar global memberikan implikasi bahwa kompetisi yang lebih ketat akan terjadi bukan hanya antar negara, tetapi juga antar daerah Kabupaten. Dalam menghadapi era global khususnya perdagangan bebas yang ditandai diberlakukannya ACFTA, suatu daerah harus mempunyai suatu kreatifitas yang tinggi dengan penggalian serta pengembangan segala produk-produk yang ada di suatu daerah supaya dapat bersaing dalam pasar bebas.

. Data Perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data UMKM**  
**(Keadaan 30 Juni 2014)**

Tahun	Usaha Mikro Dan Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM	Perkembangan	
				Nominal	Presentase (%)
2008	10.164	2.890	13.054	-	-
2009	10.146	3.061	13.207	153	1,17
2010	10.232	3.123	13.355	148	1,12
2011	10.232	3.123	13.355	-	-

2012	10.315	3.270	13.585	230	1,72
2013	11.159	2.434	13.593	8	0,06
2014	11.225	2.434	13.659	66	0,49

*Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus tahun 2012*

Dengan melihat uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul  
**“Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi impelemntasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengacu pada hal-hal yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

- a. Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal skripsi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- b. Kegunaan praktis bagi perguruan tinggi adalah untuk menambah kajian tentang pengembangan ilmu-ilmu sosial dan politik, dalam hal ini adalah kajian tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM.

### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian tentang Implementasi program pemerintah harus dikembangkan agar memberikan kritikan dan solusi terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Memperluas cakrawala berfikir tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.5. Kerangka Teori**

### **1.5.1. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui outcome dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan selama dalam kurun waktu tertentu dimana yang dilihat adalah efektivitasnya.

Penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi implementasi dari kebijakan public Karena evaluasi implementasi ini memberikan perhatian pada cara pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan

kebijakan/program dan perbaikan kebijakan/program pada masa mendatang. Dimana *output* dan dampak kebijakan merupakan indicator-indikator dalam evaluasi kebijakan, yang mempengaruhi keberlangsungan suatu kebijakan yang mengarah pada bagaimana kebijakan itu dilaksanakan serta sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai harapan yang dikehendaki.

### **1.5.2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan aktor publik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan berkepentingan publik. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.<sup>1</sup> Menurut James Anderson, “merumuskan kebijakan public merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan”.<sup>2</sup> Kebanyakan kebijakan segera itu berbentuk berbagai macam ketentuan, ketepatan atau sejenis dengan itu.<sup>3</sup> Indikator keberhasilan-keberhasilan kebijakan public dapat dilihat dari empat perspektif yaitu :

1. Mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Mampu meningkatkan rasa aman
3. Demokratis
4. Efisien dan efektif

### **1.5.3. Implementasi Kebijakan Publik**

---

<sup>1</sup> Mirian Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*. Rev. Ed, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.20

<sup>2</sup> James Anderson dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta : Grasindo, 2005), hal 108

<sup>3</sup> Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hal 17

Tujuan sebuah kebijakan tidak akan tercapai apabila kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya tidak diimplementasikan. Salah satu kelemahan yang dilakukan oleh implementer kebijakan public adalah persepsi bahwa implementasi merupakan bagian yang terpisah dalam kebijakan public. Implementasi sering digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pada tahap ini, keterlibatan policy makers (pembuat kebijakan) sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi *street level bureaucrats* (actor yang berada pada tingkat bawah) dalam angka memberikan pelayanan atau mengatur kelompok sasaran. Secara singkat, implementasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh implementor untuk mendistribusikan hasil kebijakan (policy output) kepada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan kebijakan.

### **1.5.3.1. Model Implementasi Kebijakan**

#### **1. Model Van Meter dan Van Horn**

Model pertama dalam implementasi kebijakan adalah model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait mengenai kepentingan-kepentingan tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas. Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber

- c. Kecenderungan-kecenderungan
- d. Stuktur Birokrasi

### **1.5.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Proses implementasi sebuah kebijakan merupakan proses yang rumit dan tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan ketika sebuah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Terdapat enam faktor penentu berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, yaitu :

1. Kualitas kebijakan
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran)
3. Ketepatan instrument yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya)
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya)
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
6. Kondisi lingkungan geografi, social, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

### **1.5.3.3. Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Menurut Goggin et al. (1990), kebijakan diasumsikan sebagai sebuah “pesan” dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain isi kebijakan, format kebijakan, dan lingkungan.

1. Isi kebijakan.
2. Format kebijakan.



3. Reputasi aktor.
4. Lingkungan.

#### **1.5.3.4. Kegagalan Implementasi Kebijakan**

Kegagalan proses implementasi sebuah kebijakan dapat disebabkan oleh desain kebijakan yang kurang baik. Desain kebijakan yang kurang baik dan tidak komprehensif dapat disebabkan oleh desain kebijakan oleh faktor keterbatasan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh perancang kebijakan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kegagalan dari implementasi kebijakan public, seperti:

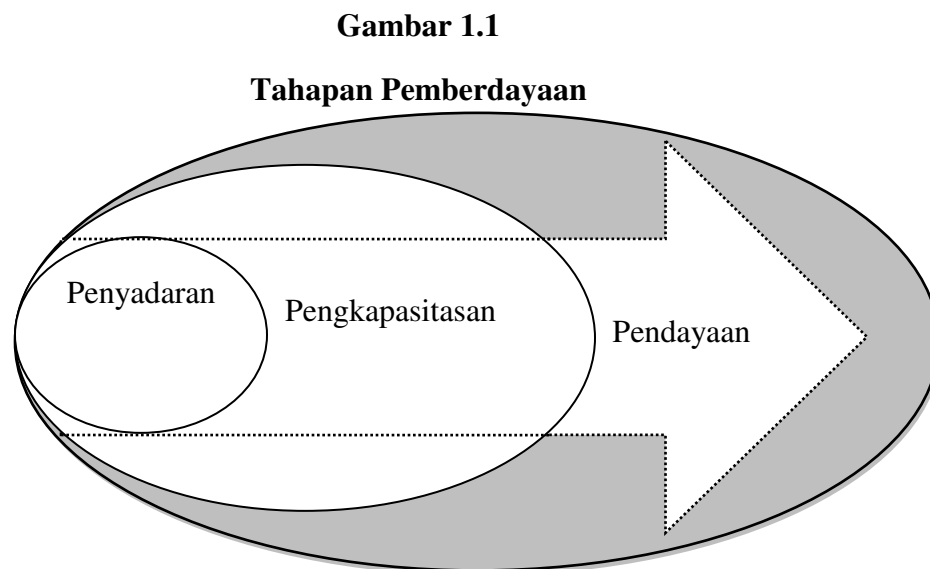
1. Spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap
2. Instansi yang tidak cocok
3. Tujuan yang berlawanan
4. Insentif yang tidak memadai
5. Ketidakjelasan arah implementasi
6. Keterbatasan keahlian
7. Sumberdaya administrasi yang terbatas
8. Kegagalan komunikasi

#### **1.5.4. Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah sebuah konsep bahwa meskipun kehidupan itu adalah proses alami, kehidupan pun perlu dan harus dimanajementi. Konsep “memanajementi”

berbeda dengan “rekayasa” karena manajemen lebih focus pada meningkatkan”nilai tambah” dari suatu aset.<sup>4</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.<sup>5</sup>



**Sumber :** Buku *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007*

**Keterangan :**

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “*pencerahan*” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “*sesuatu*”. Dalam kaitannya pada penelitian ini, targetnya adalah para pelaku UMKM. Tahap kedua adalah pengkapasitasan atau yang

<sup>4</sup>Usman Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006) hal. 14

<sup>5</sup>Randy Wrihatnolo, R& Riant Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta:PT. Gramedia, 2007) hal.2

sering disebut “*capacity building*”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk memberika daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu<sup>6</sup> :

- a. Pengkapasitasan Manusia
- b. Pengkapasitasan Organisasi
- c. Pengkapasitasan Sistem Nilai

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau “*emproverment*” dalam makna sempit. Pada tahap ini target dibuatkan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang.

#### **1.5.5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian tersebut adalah :

##### **1. Usaha Mikro**

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

##### **2. Usaha Kecil**

---

<sup>6</sup>Randy R Wrihatnolo & Riant Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta, PT. Gramedia, 2007) hal3-7

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomin produktif yang beridiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### 3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini <sup>7</sup>:

**Tabel 1.3**  
**Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta- 10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

*Jumlah Sumber : UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM*

<sup>7</sup>UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

### 1.5.5 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan UMKM itu sendiri adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tagguh dan mandiri.<sup>8</sup>

Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode “bottom up”, dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan sasaran dan dilakukan secara partisipatif. Dalam praktek pemberdayaan UMKM, untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-langkah yang dilakukan adalah <sup>9</sup>:

- a. Identifikasi Potensi
- b. Analisis Kebutuhan
- c. Rencana Program Kerja Bersama
- d. Pelaksanaan Program Kerja Bersama
- e. Monitoring dan Evaluasi

---

<sup>8</sup>UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 8 tentang UMKM

<sup>9</sup>Ravik Karsidi. *Perorganisasian Potensi Pembangunan Masyarakat, Suatu Model Menumbuhkan Partisipasi*. (Surakarta ; Makalah, KNPI Surakarta, 1988)

Usaha kecil dan menengah perlu pemberdayaan demi terwujudnya demokrasi ekonomi nasional. Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah ataupun usaha besar. Pemberdayaan usaha kecil menengah juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor antara lain melalui<sup>10</sup> :

1. Peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum
2. Pengembangan system insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan atau berorientasi ekspor
3. Peningkatan akses dan perluasan pasar bagi produk-produk UMKM

Karakteristik khusus dari manajemen perusahaan kecil dan menengah antara lain<sup>11</sup>:

- 1) Manajemen tingkat professional
- 2) Pendiri sebagai manajer
- 3) Kelemahan manajerial dalam perusahaan kecil
- 4) Ketidakjelasan yang menghambat manajemen

## **1.6. Definisi Konsep**

1. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat kemampuan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.
2. Kebijakan public adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan public.

---

<sup>10</sup>Subianto, Achmad “*Usaha Kecil Dan Menengah Terpadu di Indonesia*” (Jakarta : CV. Kasala Mitra Selaras, 2004)

<sup>11</sup>Longenecker, Justin G & Carlos W, Moore, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: PT. Salemba Emban patria, 2001) h. 482-484

3. Implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh actor-aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan akhir kebijakan.
4. UMKM adalah merupakan kelompok usaha yang memiliki skala dari yang kecil, menengah dan besar.

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu langkah yang digunakan dalam suatu penelitian atau cara kerja dalam memenuhi obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian digunakan untuk memperlancar jalannya pencarian data dan pengolahan data. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif (penilaian). Yaitu, penelitian yang melakukan penilaian tentang pelaksanaan atau implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus.

#### **1.7.1. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang akan dialisis sebagian titik fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus, maka peneliti harus melakukan penelitian di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM beserta sentra usaha-usaha yang ada di Kabupaten Kudus.

#### **1.7.2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian penelitian merupakan orang yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan suatu masalah yang di teliti. Dalam pemelihan informan, peneliti akan menggunakan teknik *Judgement sampling atau purposive sampling*. Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 subyek, yaitu :

1. Pelaksana kebijakan pemberdayaan UMKM Kabupaten Kudus yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM beserta perangkat yang dibawahnya.
2. Pengusaha UMKM di Kabupaten Kudus
3. Masyarakat

Yang menjadi subyek ketiga adalah masyarakat Kabupaten Kudus untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan dan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus yang terdapat di berbagai kecamatan.

### **1.7.3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1990:72). Dalam hal ini populasinya adalah aparat pemerintah, pelaksana kebijakan, pengusaha UMKM. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan ditunjuk untuk mewakili keseluruhan populasi.

Sampel dari masyarakat umum, untuk mengetahui dampak kebijakan UMKM ini terhadap masyarakat. Maka didapatkan perhitungan sampel menggunakan rumus Frank Lynch dengan jumlah populasi masyarakat Kabupaten Kudus pada Tahun 2014 yakni 821.136 jiwa sebagai berikut :

$$n = \frac{Nz^2.p(1-p)}{Nd^2 + Z^2.p(1-p)}$$

Keterangan :

n = Besarnya sampel

N= Populasi

Z= The value of the normal variable (1,96) untuk reabilitas 0,95

P= The largest possible proportion (0,50)



D= Sampling eror/kesalahan pengambilan sampel

Perhitungan :

$$N = 821.136 \quad p = 0,50$$

$$Z = 1,96 \quad d = 0,05$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{821.136(1,960)^2 \times 0,50 (1-0,50)}{821.136(0,05)^2 + (1,96)^2 \times 0,50(1-0,50)} \\ &= \frac{821.136(3.8416) \times (0,25)}{821.136(0,0025) + (3.8416) \times (0,25)} \\ &= \frac{7.886.190.144}{11.656.684} = 67.617 \text{ dibulatkan menjadi } 68 \end{aligned}$$

Sampel yang didapat adalah 68 pelaku UMKM di Kabupaten Kudus dengan teknik random sampling secara proporsional per kecamatan, untuk mempermudah dalam penelitian dan mendapat tanggapan yang tepat oleh masyarakat, sampel untuk masyarakat umum tersebut diambil masyarakat yang berada disekitar kegiatan UMKM atau masyarakat terdekat. Setelah ditentukan sampel yang mewakili populasi dari masyarakat ini, kemudian dalam penelitian ini, informan dan responden yang diteliti dipilih dengan metode purposive sampling. Purposive sampling dikutip dalam (Muhammad Idrus:2009:96) adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Hal ini ditujukan kepada pelaku utama yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus.

Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut cirri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu. Pada intinya peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan maksud memberikan suatu potret penelitian akan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus. Adapun informannya adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah
2. Pelaku UMKM

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan topik yang diambil peneliti. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara/Kuisoner
- b. Dokumentasi

#### **1.7.5. Jenis Data**

Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan.<sup>12</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer
2. Data sekunder

#### **1.7.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dilapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Hiberman (1994) teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).<sup>13</sup>

- a) Reduksi data (*data reduction*)

---

<sup>12</sup> J.R.Raco, Metode *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal.108.

<sup>13</sup> Punch dalam Miles dan Huberman dalam Prawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta:LkiS Pelangi Aksara, 2008), hal.104.

b) Penyajian data (*data display*)

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS

#### 2.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, tercatat Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara  $110^{\circ} 39'6''$  dan  $110^{\circ} 50'$  Bujur Timur dan antara  $6^{\circ} 51'$  dan  $7^{\circ} 16'$  Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Walaupun merupakan Kabupaten yang memiliki luas paling kecil (42.516 Ha) diantara Kabupaten di seluruh Provinsi tetapi peran dan kontribusinya tidak dapat diabaikan. Hal ini mengingat Kudus memiliki banyak industri berskala nasional bahkan global, masyarakatnya memiliki etos kerja yang tinggi yang mengantarkan Kabupaten Kudus menjadi Kota industri di Jawa Tengah yang penting. Industri andalan yang bertaraf nasional dan global seperti rokok (PT. Djarum, PT. Nojorono, PR Sukun), kertas (PT. Pura Barutama), dan elektronik (PT. HIT) atau dikenal dengan produknya yang bermerk Polytron. Terdiri dari 131 desa yang terbesar meliputi wilayah 9 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Kaliwungu
2. Kecamatan Kota
3. Kecamatan Jati
4. Kecamatan Undaan
5. Kecamatan Mejobo
6. Kecamatan Bae
7. Kecamatan Gebog
8. Kecamatan Dawe
9. Kecamatan Jekulo

**Visi Pemerintah Kabupaten Kudus** yaitu "Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera"

**Misi** Untuk menunjang visi tersebut diatas mempunyai misi sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat*
2. *Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas*
3. *Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau*
4. *Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh*
5. *Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.*
6. *Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.*
7. *Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governnance).*
8. *Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.*

## **2.2. Gambaran Umum Pelaksana Kebijakan Tentang Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus**

### **2.2.1. Pengorganisasian**

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang Perindustrian , Koperasi dan UMKM yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian , koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **2.2.2. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya usaha industri, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang mandiri, profesional, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.”

#### **b. Misi**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan Koperasi serta aparatur pembina.
2. Memberdayakan dan mengembangkan usaha industri, koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dan berwawasan lingkungan.
3. Mendorong pertumbuhan/perkembangan wirausaha baru dalam dunia usaha industri, koperasi dan UMKM.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN HASIL**

##### **EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN KUDUS**

Bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan. Temuan-temuan ini selanjutnya diuraikan dan dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus. Adapun pemberdayaan UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan fisik.

Pemberdayaan fisik meliputi pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kudus guna meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan merangsang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang melibatkan partisipasi masyarakat kelurahan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tetapi membutuhkan peran serta/partisipasi dari masyarakat.

Pada dasarnya yang menjadi objek kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus adalah masyarakat Kabupaten Kudus, dimana salah satu tujuan kebijakan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kudus mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak berbanding lurus dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Adapun yang menjadi sasaran dari pemberdayaan UMKM tersebut adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha

nasional di pasar dunia, dan dapat bersaing didalam pasar dunia, dan dapat didalam pasar bebas dan tentunya dapat memberikan brand image tersendiri dan menjadi khas Kabupaten Kudus.

Tujuan dalam penelitian ini adalah hal yang menjadi tujuan yang sudah direncanakan oleh penulis. Tujuan ini terdapat dalam suatu kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik serta lingkungan kebijakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dalam kajian penelitian ini. Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan hasil penelitian evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu :

1. Kesimpulan
2. Saran
3. Keterbatasan penelitian

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kudus memiliki potensi yang sangat melimpah karena berada di jalur pantura yang merupakan jalur alternatif perdagangan sehinggaini menjadi salah satu faktor pendukung munculnya dan berkembangnya UMKM di Kabupaten Kudus karena produk UMKM dapat berasal dari berbagai sumber di Kabupaten Kudus baik dari dataran rendah maupun pegunungan.
2. Dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana kebijakan, adapun dalam pemberdayaan UMKM dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: pencerahan untuk diberikan motivasi dan semangat dalam melakukan usaha, pengkapasitasan yaitu berupa capacity building atau memampukan baik individu maupun kelompok UMKM yang dilakukan dengan berbagai



pelatihan, sosialisasi, pengelompokkan dan pembuatan regulasi atau aturan dan tahap ketiga adalah pendayaan atau pemberian daya simana pelaku UMKM diberikan otoritas atau wewenang untuk melakukan kegiatan UMKM sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik kemampuan SDM, ketrampilan maupun anggran

3. Secara umum implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus telah berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dengan pelaku UMKM. Disposisi atau sikap pemerintah kepada pelaku UMKM dimana pemerintah mempunyai komitmen tinggi untuk memajukan UMKM di Kabupaten Kudus, adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan adanya pemberdayaan yang riil yang dilakukan pemerintah kepada pelaku UMKM hanya saja dalam pelaksanaanya dilapangan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus ini belum dapat menjangkau seluruh UMKM di Kabupaten Kudus dan masih terdapat banyak masyarakat yang tidak menikmati fasilitas atau kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut
4. Faktor yang mendukung kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus adalah adanya keseriusan dan komitmen tinggi dari pemerintah Kabupten Kudus dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kudus. Pemerintah terus berupaya untuk menjadikan UMKM di Kudus sebagai saran peningkatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat
5. Sedangkan kendala dan kelemahan yang dihadapi dalam kebijakan pemberdayaan UMKM ini adalah terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan sehingga di Kabupaten Kudus masih banyak terdapat UMKM yang belum diberdyakan, belum tersedianya sarana atau fasilitas yang teapt dan yang dapa dijadikan sebagai sarana

memasarkan produk-produk hasil UMKM yang ada di Kabupaten Kudus, tidak memaksimalkan penggunaan IPTEK untuk mengembangkan dan memasarkan UMKM di Kabupaten Kudus karena masih minimnya SDM pelaku UMKM untuk pemanfaatan teknologi informasi, pelaku UMKM cepat puas dengan hasil yang sudah ada sehingga ketika hasil UMKM yang ditekuninya mendapatkan hasil mereka susah untuk diajak lebih berkembang dan yang menjadi kendala cukup serius di Kabupaten Kudus masih belum terdapatnya Perda yang mengatur secara detail terkait kebijakan UMKM di Kabupaten Kudus

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka diperlukan saran langkah-langka yang mungkin diambil untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus. Adapun saran langkah-langkah nya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kudus harus terus berupaya untuk mencari, memanfaatkan mengelola potensi yang ada di Kabupaten Kudus yang bisa di kembangkan untuk UMKM, yang diharapkan menjadi suatu inovasi tersendiri yang mungkin belum terdapat di daerah lain dan faktor lokasi Kabupaten Kudus yang sangat strategis dapat dikembangkan sebagai sarana pemasaran dan pengenalan produk UMKM Kabupaten Kudus untuk dikenal ke berbagai penjuru
2. Perlunya peningkatan anggaran untuk kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus sehingga pemberdayaan dapat dilakukan lebih merata, sehingga pelaku UMKM baik skala kecil, sedang maupun besar dapat diberdayakan dan dapat diberdayakan dan dapat mengajak masyarakat Kabupaten Kudus untuk berwirausaha dengan menekuni

bidang UMKM daripada menjadi pekerja lepas harian, program-program pelatihan juga terus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta memajukan usaha pelaku UMKM

3. Perlu adanya evaluasi atau melakukan jejak pendapat mengenai pelaksanaan kebijakan ini kepada masyarakat, agar mengetahui bagaimana yang dirasakan dan diharapkan oleh masyarakat. Selain itu untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kebijakan sehingga pemerintah dapat mengatasi hal tersebut kelak kemudian hari kebijakan yang telah berjalan cukup baik ini dapat berjalan dengan baik dan berlanjut untuk periode-periode berikutnya. Selain itu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pemerintah untuk diketahui tingkat produktivitas kinerja pemerintah
4. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan dan memajukan UMKM di Kabupaten Kudus, dengan berbagai fungsi kebijakan dan program pendukung lainnya, fasilitasi modal, pemberian penghargaan bagi pelaku UMKM yang berhasil dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pelopor dan sebagainya sehingga masyarakat dan pelaku UMKM tertarik untuk menekuni dan mengembangkan UMKM di kabupaten Kudus
5. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM pemerintah harus sigap mengatasi hal tersebut dimulai dengan dibuatkan suatu perda yang mengatur dan menjelaskan tentang kebijakan pemberdayaan UMKM, selanjutnya perlu dibuatkan tempat pusat pemasaran produk unggulan di Kudus. Dan kebetulan Kudus sudah mempunyai tempat tersebut tetapi belum dikelola dengan baik. Selain itu dibuatkan situs resmi dan databasetang bagus sehingga masyarakat luas bisa mudah mengaksesnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku :

- Abdul Wahab, solichin, “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, UPT Penerbit Universitas Muhammdiyah, Malang. 2008
- Arikunto, suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Jakarta:1998
- Badjuri, Abdul Kahar & Teguh Yuwono. *Kebijakan Publik.Konsep dan Strategi*. Semarang:JIP UNDIP,2002
- Irvan islamy, *Kebijakan Publik* (Jakarta:1988)
- Longenecker, Justin G & Carlos W. Moore, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria : 2002
- Nawawi, Ismail, *Public Policy Analysis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* Surabaya : ITS Press. 2009
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : 1998
- Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang* Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006
- Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo. 2002
- Nugroho D, Riant : *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul Yogyakarta* : Pustaka Pelajar, 2008
- Prasetyo, Aries Heru” *Sukses Mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah*” Jakarta : PT. Elek Media Komputindo. 2010
- Sasmito. ”*Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha*” Yogyakarta : PT.Buku Kita. 2007
- Subianto, Achmad “ *Usaha Kecil dan Menengah Terpadu di Indonesia*” Jakarta : CV. Kasala Mitra Selaras. 2004
- Usman, Suntoyo, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2006

- William Dunn (1999). *Pengantar Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.2000
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta. 2007
- Wrihatnolo, Randy R& Riant Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, PT.Gramedia, 2007
- Wayne Parson, *Public Policy : Pengantar dan Praktik Analisis Kebijakan*, Cetakan Ke-2, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Riant Nugroho D, *Kebijakan PUblik Untuk Negara-Negara Berkembang*, cetakan pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006
- Mirian Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*. Rev. Ed, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- James Anderson dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta : Grasindo, 2005)
- Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)
- AG. Subarsono, *Analisis kebijakan public konsep. Teori dan aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Randy Wrihatnolo, R& Riant Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta:PT. Gramedia, 2007)
- Randy R. Wihatnolo dan Riant Nugroho Widjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta:PT. Elek Media Komputindo, 2007)
- Prasetyo, Aries Heru "Sukses Mengelola Usaha Mikro Kecil Dan Menengah" (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo) 2010
- Ravik Karsidi. *Perorganisasian Potensi Pembangunan Masyarakat, Suatu Model Menumbuhkan Partisipasi*. (Surakarta ; Makalah, KNPI Surakarta, 1988)
- Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong. *Metodologi kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Punch dalam Miles dan Huberman dalam Prawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta:LkiS Pelangi Aksara, 2008)

**Sumber dari Undang-undang :**

UUD 1945 dengan penjelasannya

UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 8 tentang UMKM

UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

**Sumber internet :**

[www.kab.Kudus.go.id](http://www.kab.Kudus.go.id) Diakses pada hari senin,02 Juli 2013 pukul 20.00 WIB

[www.diskopumkm.go.id](http://www.diskopumkm.go.id) Diakses pada hari senin,02 Mei 2013 pukul 20.00 WIB

[http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/index.php?option=com\\_artbannersplus&tas](http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/index.php?option=com_artbannersplus&task=clk&id=68)

[k=clk&id=68](http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/index.php?option=com_artbannersplus&task=clk&id=68) Di akses pada hari senin, 02 Mei 2013 pukul 20.00 WIB